



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NURUL HUSNA LISTYATI
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
3. NHK : 933169

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	325.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 590 m2/220 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , Rp. 325.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	277.700.000
1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000		
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 8.300.000		
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 9.400.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	22.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	37.473.036
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	662.173.036
III. HUTANG	Rp.	195.847.120
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	466.325.916

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.